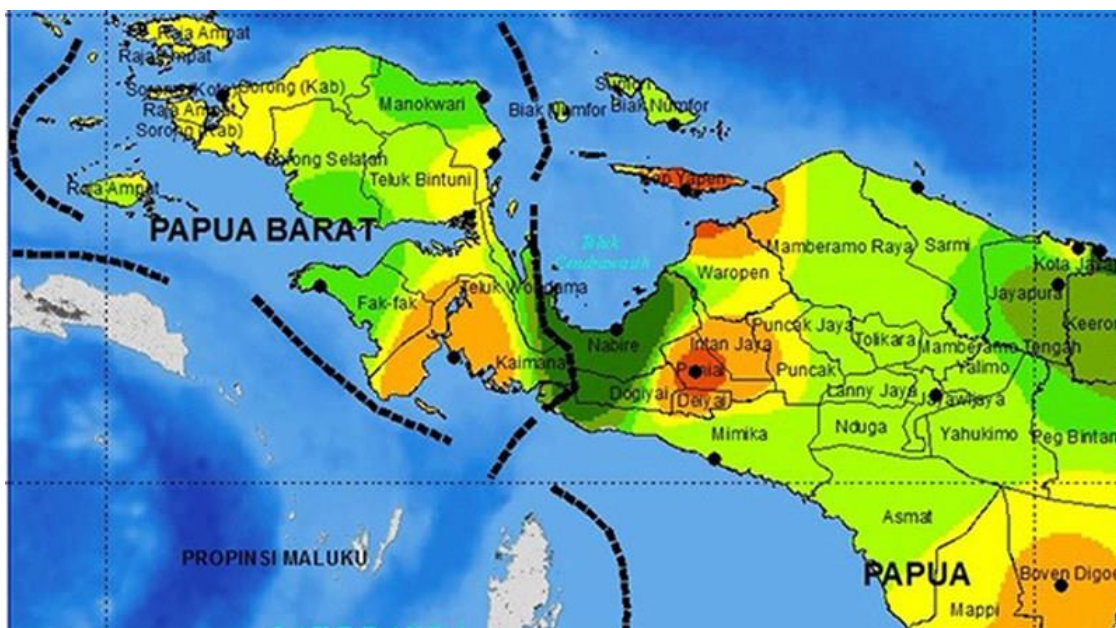




**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018
KE PROVINSI PAPUA**

TANGGAL 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2017



**JAKARTA
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Komisi VIII DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 membentuk Tim Kunjungan Kerja Reses yang salah satunya ke Provinsi Papua.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses pada Reses MP I TS 2017-2018 ke Provinsi Papua berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti: Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya.

- b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Papua ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d 3 November 2017.

E. Daftar Nama Anggota Tim Kunjungan Kerja

| NOMOR | | N A M A | JABATAN | FRAKSI | DAPIL |
|----------|----------|---|----------------------------|--------|----------------|
| UR UT | AN GG | | | | |
| 1 | 271 | Dr. H. NOOR ACHMAD, MA. | Wakil Ketua Komisi VIII | F G | JATENG II |
| 2 | 86 | H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA. | Wakil Ketua Komisi VIII | PKS | SUMUT II |
| 3 | 154 | DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. | ANGGOTA | PDI P | JABAR III |
| 4 | 175 | ALFIA REZIANI | ANGGOTA | PDI P | JATENG V |
| 5 | 240 | H. JOHN KENEDY AZIZ | ANGGOTA | P G | SUMBAR II |
| 6 | 274 | HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH. | ANGGOTA | P G | JATENG IV |
| 7 | 322 | Pdt. ELION NUMBERI, S.Th. | ANGGOTA | P G | PAPUA |
| 8 | 370 | Drs. H. SUPRIYANTO | ANGGOTA | GER | JATIM VII |
| 9 | 375 | H. ANDA, SE., MM. | ANGGOTA | GER | BANTEN I |
| 10 | 412 | DWI ASTUTI WULANDARI, B.Com. | ANGGOTA | P D | DKI JKT I |
| 11 | 426 | KHATIBUL UMAM WAIRANU, M.Hum. | ANGGOTA | P D | JATENG VIII |

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 12 | 492 | Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si. | ANGGOTA | PAN | JATIM IX |
| 13 | 48 | H. MAMAN IMANUL HAQ | ANGGOTA | PKB | JABAR IX |
| 14 | 123 | MUHAMMAD YUDI KOTOUKY | ANGGOTA | PKS | PAPUA |
| 15 | 512 | H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom.I | ANGGOTA | PPP | DKI JKT I |
| 16 | 16 | Drs. H. CHOIRUL MUNA | ANGGOTA | NASDEM | JATENG VI |
| 17 | - | HERNADI, SIP, M.Si | Sekretariat Komisi VIII | | |
| 18 | - | SRI LESTARI | Sekretariat Komisi VIII | | |
| 19 | - | CHAIRUL WALID, SPd., M.Si | Tenaga Ahli Komisi VIII | | |
| 20 | - | LUTHFANDY KURNIAWAN SAPUTRO | Protokol Komisi VIII | | |
| 21 | - | DEVI IRIANDI | Media Cetak dan Medsos | | |

BAB II

PELAKSANAAN DAN TEMUAN LAPANGAN

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan mitra kerja Komisi VIII DPR RI berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kepala Dinas sosial, Kepala Kanwil Kemenag, Kepala Dinas PPPA, Kepala BPBD Provinsi Papua, Kepala BAZDA dan Rektor IAIN Jayapura. Pada pertemuan tersebut dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Provinsi Papua merupakan salah satu paru-paru dunia dengan jumlah kawasan hutannya sekitar 35 juta hektar.
2. Kehidupan beragama di Provinsi Papua selama ini berjalan cukup baik, adanya berbagai macam agama dalam satu keluarga merupakan hal yang lumrah terjadi di Papua.
3. Dr. Idrus Al Hamid Rektor IAIN Jayapura menyampaikan usulan agar pendekatan dalam Penanggulangan Bencana dilakukan dengan pendekatan Kultural agar lebih optimal target dan penyebarannya. Dalam hal sosial perlu ada bantuan beasiswa khusus bagi anak asli dan lahir di Papua.
4. Dari Kanwil Kemenag mengusulkan alokasi anggaran Tahun 2018 untuk Kanwil Kemenag Provinsi Papua terutama program bantuan bagi gereja dan kegiatan dialog-dialog.
5. Dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua menyampaikan dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Papua hanya 24 Kabupaten/Kota yang menerima PKH tahun 2017. Mengusulkan penambahan penerima PKH pada tahun anggaran 2018 bagi Provinsi Papua sehingga seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan PKH.
6. Besaran nominal PKH sebesar 2 juta perkeluarga pertahun dengan rata-rata Rp150.000 perbulan dirasakan sangat tidak mencukupi bagi masyarakat Papua disebabkan harga kebutuhan bahan pokok di Papua sangat jauh harganya dibanding Provinsi lainnya. Mengusulkan penyesuaian besaran nominal PKH dengan kondisi ekonomi masyarakat.

7. Dari Kepala BPBD Provinsi Papua menyampaikan masih adanya 3 Kabupaten yang belum mau membuka BPBD Kabupaten yaitu Kabupaten Mapi, Boven Digul dan Asmat. Mengingat wilayah Papua adalah wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana.
8. Dana APBD selama ini belum mampu untuk mengakomodir Program Penanggulangan Bencana di daerah sehingga Dana Siap Pakai atau dana On call dari pusat sangat bermanfaat bila terjadi bencana.
9. Kepala BPBD Provinsi Papua mengusulkan dana Rehab Rekon yang diberikan agar dicairkan pada akhir tahun untuk melancarkan pelaksanaannya.
10. Mengingat wilayah Papua terdapat 97 patahan yang berpotensi untuk terjadinya gempa bumi, diusulkan perlunya ditingkatkan sarana dan prasarana Early warning di wilayah Papua.
11. Mengusulkan untuk penanggulangan bencana di wilayah Papua agar dibangun 5 (lima) Gudang Logistik yang berbasis kepada wilayah Adat karena saat ini belum terdapat Gudang Logistik di wilayah Papua. Dan juga dengan basis wilayah adat dapat memperlancar penanganan bencana di daerah Papua.
12. Usulan dari Kanwil Kemenag Papua dalam masalah alokasi anggaran untuk kegiatan keagamaan sangat kecil dibanding alokasi anggaran untuk pendidikan, maka mengusulkan agar ada alokasi anggaran dana khusus untuk keummatan seperti untuk tenaga penyuluh keagamaan agar mereka dapat bekerja optimal.
13. Masalah jumlah kuota jemaah haji Provinsi Papua hanya 2,5 kloter, Kanwil Kemenag Papua mengusulkan agar ada penambahan kuota mengingat masa tunggu /antrian di Papua sudah mencapai 17 tahun.
14. Dalam proses penerimaan pegawai dengan menggunakan sistem komputerisasi berdampak kepada berkurangnya masyarakat lokal yang diterima disebabkan kalah dalam persaingan. Pemda mengusulkan agar mempertimbangkan kuota bagi masyarakat lokal.

BAB III

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan dilapangan pada saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Papua maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI perlu mendesak Kementerian Sosial RI terkait penambahan penerima PKH pada tahun anggaran 2018 bagi Provinsi Papua sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mendapatkan alokasi PKH.
2. Komisi VIII DPR RI perlu mengusulkan kepada Kementerian Sosial RI terkait peningkatan besaran nominal PKH yang diterima di Provinsi Papua agar disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat terutama harga barang yang jauh lebih tinggi dari daerah lainnya.
3. Komisi VIII perlu mengusulkan kepada Kemenag RI terkait penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan keagamaan di Provinsi Papua. Agar ada alokasi anggaran dana khusus untuk keummatan seperti untuk tenaga penyuluh keagamaan sehingga mereka dapat bekerja optimal.
4. Komisi VIII perlu mengusulkan penambahan jumlah kuota jemaah Haji untuk Provinsi Papua untuk mengurangi masa tunggu jemaah yang saat ini mencapai 17 tahun.
5. Komisi VIII DPR RI perlu mendesak BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua terkait percepatan pembentukan BPBD di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Mapi, Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Asmat mengingat wilayah ini rawan terhadap bencana.
6. Komsii VIII perlu mengusulkan kepada BNPB terkait pencairan dana rehab rekon agar diberikan pada akhir tahun sehingga penyaluran menjadi optimal.
7. Komisi VIII DPR RI perlu mengusulkan kepada BNPB agar dibangun 5 (lima) Gudang Logistik yang berbasis kepada wilayah Adat Papua karena saat ini belum terdapat Gudang Logistik di wilayah Papua agar dapat memperlancar penanganan bencana di daerah Papua.
8. Komisi VIII perlu mengusulkan kepada Kementerian PPPA terkait penambahan anggaran untuk Provinsi Papua terutama penambahan pengadaan mobil operasional (mobil off road) yang sesuai dengan medan di daerah Papua yang berat.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah laporan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Papua. Semoga dapat menjadi bahan dan masukan dalam pembahasan di rapat-rapat Komisi VIII DPR RI dengan mitra kerjanya serta dapat meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

Foto Kegiatan

Foto 1 : Mengunjungi salah satu E Warung Kube Rajawali



Foto2 Pertemuan dengan Pemda Provinsi Papua

